

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

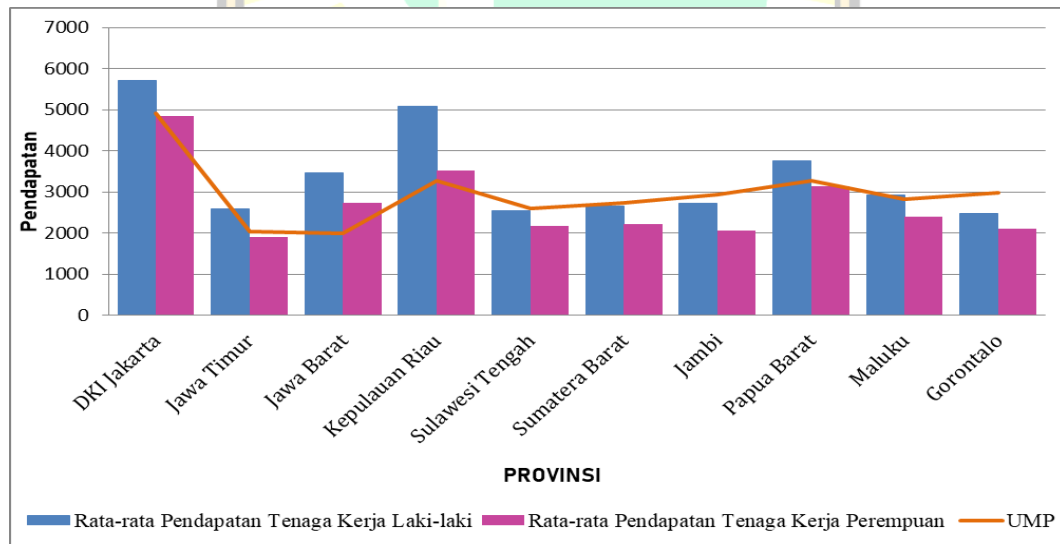
Perempuan memiliki peran yang semakin penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia seiring meningkatnya partisipasi mereka di pasar tenaga kerja. Peningkatan partisipasi ini didorong oleh perkembangan pendidikan, kemajuan teknologi, dan perubahan pola sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki peran ganda dimana perempuan tidak hanya berperan dalam pekerjaan domestik, tetapi juga menjadi pencari nafkah yang berkontribusi terhadap pendapatan keluarga (Minot et al., 2022). Di satu sisi, perempuan menjadi motor ekonomi keluarga, tetapi di sisi lain, pekerja perempuan juga dihadapkan pada ketimpangan kesempatan, stereotip gender, serta beban ganda antara pekerjaan publik dan domestik. Kondisi ini membatasi alokasi waktu kerja perempuan dibandingkan tenaga kerja laki-laki, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan tingkat pendapatan.

Tenaga kerja perempuan masih menghadapi kesenjangan pendapatan yang signifikan. Data BPS (2024b) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan tenaga kerja laki-laki di Indonesia mencapai Rp3,3 juta, sementara pendapatan tenaga kerja perempuan hanya sebesar Rp2,5 juta, atau sekitar 22 persen lebih rendah. Menurut Reshi & Sudha (2023), kesenjangan tersebut berkaitan dengan diskriminasi gender di pasar tenaga kerja negara berkembang, yang tercermin dari pendapatan perempuan yang lebih rendah, prospek karir terbatas, serta akses yang lebih sempit terhadap pendidikan dan pekerjaan dengan keterampilan rendah yang berupah sangat kecil. Kondisi ini menghambat tenaga kerja perempuan dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan dengan pendapatan yang layak.

Kajian ketenagakerjaan erat kaitannya dengan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Aprilia & Aida (2024) menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas dan output sebagai hasil pembangunan manusia dapat mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah, termasuk

output yang dihasilkan oleh tenaga kerja, sehingga peningkatan PDRB per kapita secara teoritis seharusnya diikuti oleh peningkatan pendapatan tenaga kerja. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya tercermin di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023, Jawa Timur merupakan provinsi dengan PDRB tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp1.844,81 triliun, dengan PDRB per kapita yang meningkat dari Rp42,6 juta menjadi Rp44,4 juta. Sebaliknya, rata-rata pendapatan tenaga kerja perempuan justru menurun dari Rp1.955.900 pada tahun 2022 menjadi Rp1.905.300 pada tahun 2023.

Dalam literatur ketenagakerjaan, upah minimum sering digunakan sebagai tolok ukur dasar dalam membandingkan pendapatan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak secara kemanusiaan, dan sebagai pelindungnya, pemerintah menetapkan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan upah minimum (Putri, 2024).



**Gambar 1.1 Rata-rata Pendapatan Bersih (Ribu Rupiah) Pekerja Menurut Jenis Kelamin pada Provinsi Terpilih Berdasarkan Tingkat PDRB 2023**

*Sumber: BPS, 2024c*

Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja laki-laki dan perempuan di beberapa provinsi di Indonesia tahun 2023. Provinsi yang ditampilkan dipilih berdasarkan tingkat PDRB tertinggi, menengah, dan terendah

untuk menunjukkan rendahnya pendapatan tenaga kerja perempuan tidak hanya terjadi pada daerah dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, tetapi juga terjadi pada daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Data BPS (2024c) mencatat pendapatan tenaga kerja perempuan di Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp1.905.300, masih berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp2.040.240, meskipun Jawa Timur merupakan provinsi dengan skala ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Secara teoritis, peningkatan PDRB per kapita mencerminkan peningkatan produktivitas yang seharusnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Namun, berbeda dengan DKI Jakarta yang pendapatan tenaga kerjanya telah berada di atas UMP, kondisi di Jawa Timur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif, dimana manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara merata di pasar tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan tenaga kerja perempuan dalam memperoleh pendapatan yang layak tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik individu dan struktural, seperti kualitas modal manusia, kondisi sosial dan demografis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Dalam literatur ketenagakerjaan dan modal manusia, tingkat pendapatan tenaga kerja merupakan hasil interaksi antara karakteristik individu dan struktur pasar tenaga kerja (Landmesser, 2019). Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja merupakan komponen utama modal manusia yang berperan dalam meningkatkan produktivitas dan peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Peningkatan tingkat pendidikan mendorong akumulasi pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan tenaga kerja (Thirlwall, 1999), dimana tenaga kerja dengan capaian pendidikan menengah dan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih besar (Stejskal & Stávková, 2014). Selain pendidikan, investasi dalam pelatihan kerja juga berpotensi meningkatkan pendapatan melalui peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja (Becker, 1993), sebagaimana ditunjukkan oleh temuan

Salsabila & Budiasih (2023) pelatihan kerja meningkatkan peluang wanita untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Namun, Rahmawati & Setiadi (2024) menemukan bahwa pengaruh pelatihan tidak selalu signifikan.

Pengalaman kerja turut mempengaruhi tingkat pendapatan karena pengalaman yang lebih panjang dapat meningkatkan kematangan dan keterampilan kerja, sehingga memperbesar peluang memperoleh gaji yang lebih tinggi (Hadi et al., 2024). Di sisi lain, Christopher et al. (2017) menemukan hubungan negatif antara pengalaman kerja dan pendapatan. Selain pengalaman kerja, status pekerjaan pada sektor formal atau informal juga menjadi faktor struktural yang membedakan tingkat pendapatan tenaga kerja. Dalam sektor informal, ketiadaan kontrak kerja yang jelas dan rendahnya kepastian pendapatan menyebabkan pekerja menerima pendapatan yang relatif lebih rendah, sedangkan sektor formal ditandai oleh adanya kontrak kerja dan kepastian besaran gaji (Mustika, 2013). Kondisi ini membuat pekerja perempuan di sektor formal cenderung memperoleh rata-rata pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan di sektor informal (Farisi, 2022).

Selain itu, perbedaan wilayah tempat tinggal dan status perkawinan merupakan faktor demografis yang berpotensi mempengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja perempuan. Wilayah tempat tinggal mencerminkan variasi akses terhadap pasar tenaga kerja, infrastruktur, dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima. Kompa & Witkowska (2018) menemukan bahwa pekerja yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, meskipun Huruta et al. (2019) menunjukkan bahwa tipe wilayah tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja perempuan. Selain itu, status perkawinan juga dikaitkan dengan perbedaan pendapatan, dimana perempuan yang telah menikah cenderung memiliki pendapatan lebih rendah akibat keterbatasan alokasi waktu kerja karena tanggung jawab domestik (Qadir & Afzal, 2019). Namun, temuan Huruta et al. (2019) menunjukkan bahwa status perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja perempuan, yang mengindikasikan adanya variasi hasil dalam literatur.

Perkembangan teknologi informasi dan digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam struktur pekerjaan, sistem kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Pemanfaatan teknologi digital, seperti komputer, telepon seluler, dan internet, memungkinkan tenaga kerja menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat dan efisien, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan (Choirinisa & Ikhwan, 2022). Zhang & Li (2024) menemukan bahwa penggunaan teknologi digital mendorong inovasi, kewirausahaan, dan mobilitas sektoral, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat pendapatan dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga mendorong pemanfaatan media sosial tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi sebagai media kerja dan pengembangan usaha. Kondisi ini membuka peluang bagi munculnya pekerja digital yang bekerja secara mandiri melalui platform atau aplikasi digital, termasuk pekerjaan jarak jauh seperti jasa penerjemahan, desain, analisis data, pengembangan perangkat lunak, penjualan, promosi produk, hingga pembuatan konten media sosial (BPS, 2024c). Hamid & Ismail (2021) menemukan penggunaan media sosial mendorong kreativitas dan inovasi tenaga kerja.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja perempuan menunjukkan hasil yang beragam. Dalam konteks Provinsi Jawa Timur tahun 2023, meskipun pertumbuhan ekonominya tinggi, rata-rata pendapatan tenaga kerja perempuan masih relatif rendah dan cenderung berada di bawah tingkat UMP. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan tenaga kerja perempuan dalam memperoleh pendapatan yang layak, meskipun berada di wilayah dengan kinerja ekonomi yang tinggi. Pendapatan individu memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sehingga rendahnya pendapatan tenaga kerja perempuan berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga. Studi mengenai nilai ekonomi perempuan ini juga lebih menarik untuk diteliti karena perempuan menghadapi tantangan struktural berupa konflik peran antara aktivitas produktif dan tanggung jawab domestik, khususnya bagi perempuan yang telah menikah (Elfindri & Bachtiar, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini

penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja perempuan di Provinsi Jawa Timur tahun 2023.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, wilayah tempat tinggal, status pekerjaan, status perkawinan, teknologi digital dan media sosial terhadap tingkat pendapatan tenaga kerja perempuan di Provinsi Jawa Timur?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh variabel independen tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, wilayah tempat tinggal, status pekerjaan, status perkawinan, teknologi digital dan media sosial terhadap tingkat pendapatan tenaga kerja perempuan di Provinsi Jawa Timur.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi tenaga kerja, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja perempuan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai hubungan antara karakteristik individu dan struktural tenaga kerja perempuan dengan tingkat pendapatannya, terutama dalam konteks regional Provinsi Jawa Timur.
2. **Manfaat Praktis:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga ketenagakerjaan, serta organisasi pemberdayaan perempuan dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan tingkat pendapatan tenaga kerja perempuan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penguatan akses pendidikan, pelatihan kerja, serta pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja perempuan.